

# LAPORAN TRIWULAN III



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# 2020

## PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI

## KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Standardisasi Industri kepada stakeholder dan pihak terkait maka disusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) TRIWULAN IIII Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Hal ini merupakan perwujudan komitmen manajemen Pusat Standardisasi Industri dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006, sebagai penerapan prinsip-prinsip transparansi yang akuntabel. Laporan ini memuat seluruh kegiatan pada Pusat Standardisasi Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibiayai dari DIPA tahun 2020.

Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis pada Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Demikian pula halnya dengan rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembuat kebijakan serta peningkatan bagi seluruh pegawai pada Pusat Standardisasi Industri dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, 6 Oktober 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



**Ni Nyoman Ambareny**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	3
BAB II RENCANA .....	5
PROGRAM/KEGIATAN .....	5
2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	5
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN .....	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	7
3.1.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
BERDASARKAN INDIKATOR DALAM PERJANJIAN KINERJA.....	9
3.1.2 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
BERDASARKAN INDIKATOR PADA KINERJA OUTPUT KEGIATAN.....	15
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN .....	22
3.2.1 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA.....	38
3.2.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN KINERJA <i>OUTPUT</i> .....	
KEGIATAN .....	22
3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT .....	22
3.3.1 LANGKAH DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA .....	
.....	22
3.3.2 LANGKAH DAN TINDAK LANJUTPELAKSANAAN KINERJA OUTPUT .....	
KEGIATAN .....	23
BAB IV PENUTUP .....	23
LAMPIRAN .....	23
FORM A	
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI	
- FORM ALKI	

## DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI.....	4
TABEL 2.1 DAFTAR KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020.....	5
TABEL 2.2 SASARAN KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN 2020 .....	5
TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN.....	6
TABEL 3.1 RENCANA AKSI PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020 .....	7
TABEL 3.2 REALISASI PENCAPAIAN TRIWULAN III PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI .	9
TABEL 3.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I TRIWULAN III PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	10
TABEL 3.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II TRIWULAN III PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	12
TABEL 3.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III TRIWULAN III PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	13
TABEL 3.6 PAGU ANGGARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020 .....	15
TABEL 3.7 REALISASI OUTPUT I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020 .....	15
TABEL 3.8 REALISASI OUTPUT II SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020 .....	16
TABEL 3.9 REALISASI OUTPUT III SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020 .....	17
TABEL 3.10 REALISASI OUTPUT IV SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020.....	18
TABEL 3.11 REALISASI OUTPUT V SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020.....	18
TABEL 3.12 REALISASI OUTPUT VI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA 2020.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi**

Pusat Standardisasi Industri merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pustan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga unit kerja.

### **1.2. Latar Belakang Kegiatan**

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Hingga saat ini terdapat 4.977 SNI bidang industri dari 11.740 SNI secara nasional. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis/SubKomite Teknis di lingkungan Kemenperin sebanyak 34 KT/SKT yang mencakup berbagai produk/komoditi industri binaan Kementerian Perindustrian. Setiap tahun Komite Teknis/SubKomite Teknis membuat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun kebutuhan pasar.

Untuk kepentingan keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing;

dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri, maka pemerintah dapat memberlakukan SNI secara wajib.

Hingga akhir TRIWULAN III tahun 2020 SNI telah diberlakukan 113 SNI secara wajib bidang industri yang meliputi komoditi makanan, minuman, kimia, logam, tekstil dan aneka, permesinan, alat transportasi darat, dan elektronika. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama perdagangan secara internasional (WTO) maka Indonesia juga harus mengikuti aturan yang berlaku terkait bidang standardisasi misalnya seperti melakukan notifikasi jika Indonesia akan memberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan mekanisme Technical Barriers to Trade (TBT) – WTO. Selain itu dalam kerjasama regional seperti ASEAN, standar juga telah menjadi perhatian utama dengan dibentuknya ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Dari data yang ada dengan diberlakukannya SNI secara wajib, dapat dilihat dampak secara ekonomi dimana terjadi penurunan nilai impor terhadap produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

Dalam pelaksanaan regulasi teknis, banyak negara melakukan teknik-teknik yang tidak langsung mempersulit pelaku usaha untuk memasukkan produknya ke negara tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa harus dilakukan pengujian dan sertifikasi di lembaga yang terdaftar dalam notified body tersebut. Hal serupa dilakukan pula di US, Jepang, Tiongkok, India, dan negara lainnya.

Mengingat standar saat ini digunakan sebagai barrier di dalam mekanisme perdagangan, maka untuk mengatasi keberagaman skema sertifikasi, ditetapkanlah ISO 17067:2013 (Conformity Assessment – Fundamentals of Product Certification and Guidelines for Product Certification Scheme) mengenai skema sertifikasi yang memperkenankan regulator untuk menyusun skema sertifikasi terkait dengan standar yang ditetapkan menjadi regulasi teknis.

Dalam pelaksanaan penerapan SNI/ST secara wajib bidang industri, Menteri Perindustrian menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Pengujian yang diperkenankan memproses SPPT SNI/ST yang tentunya telah dilakukan evaluasi baik secara administrasi maupun kompetensi oleh BPPI sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPI Nomor 422 Tahun 2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian. Skema sertifikasi yang nantinya telah dirumuskan oleh regulator menjadi bagian dari penilaian kelayakan penunjukan LPK.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pustan Industri mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Susunan organisasi Pustan Industri berdasarkan Permenperin tersebut yaitu:

1. Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri;
3. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
4. Subbagian Program dan Tata Usaha;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Pusat Standardisasi Industri:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Industri

## BAB II RENCANA KEGIATAN

### 2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pustan Industri berdasarkan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai satu kegiatan yaitu Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri. Kegiatan ini memiliki komponen kegiatan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2020

1860	Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri
1860.001	<b>Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri</b>
	Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk Ikm dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri
	Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain
	Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)
	Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI
1860.002	<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</b>
	Pengawasan Standardisasi Industri
	Penegakan Hukum Standardisasi Industri
1860.003	<b>Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri</b>
	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri
1860.004	<b>Pengembangan Standardisasi Industri</b>
	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC
	Peninjauan SNI
	Kajian Standardisasi
1860.005	<b>Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>
	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib
1860.010	<b>Layanan Manajemen Satker</b>
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

### 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Rencana Strategis Pustan Industri dan Rencana Kinerja, Pustan Industri pada Tahun 2020 menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2020 dengan indikator kinerja seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan Pustan Industri Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam	SNI bidang industri yang diterapkan	5%



	negeri		
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai >80.1

Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

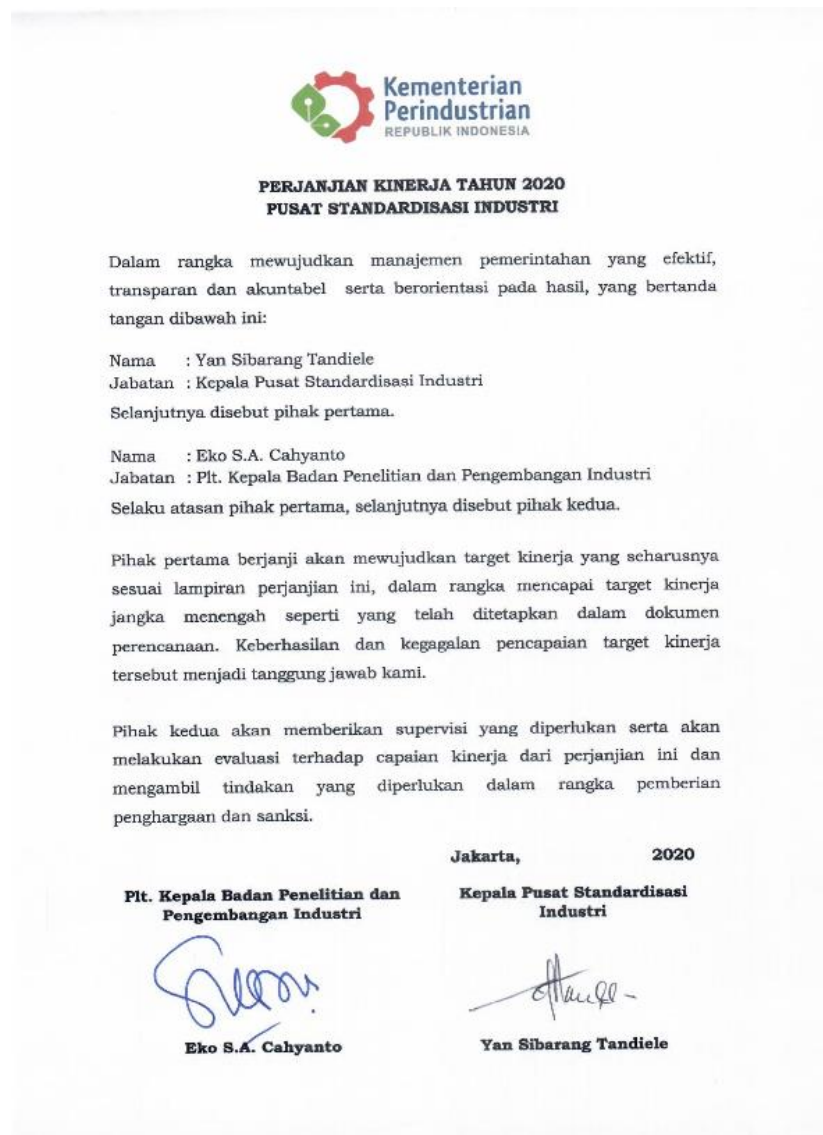
Kode	Output	Indikator Kinerja	Target
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Tersedianya Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk Ikm dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Penunjukan LPK	15 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Manajemen PPSI	1 Regulasi
1860.002	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Pengawasan Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
		Penegakan Hukum Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
1860.003	Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	Jumlah Personil PPNS-I	20 Orang
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	Tersedianya RSNI, ST dan/atau PTC	100 Standar
		Jumlah SNI yang ditinjau	1 Laporan
		Jumlah Kajian Standardisasi	2 Kajian
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jumlah Alat	10 Unit
1860.010	Layanan Manajemen Satker	Tersedianya Dukungan Teknis Manajemen Kinerja	1 Laporan


## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Hasil dan Analisis Capaian yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut

Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 adalah suatu pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Pustan Industri untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2020 untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1 Perjanjian Kinerja Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020



  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : Yan Sibarang Tandiele  
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Industri  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko S.A. Cahyanto  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

<b>Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri</b>  <b>Eko S.A. Cahyanto</b>	<b>Kepala Pusat Standardisasi Industri</b>  <b>Yan Sibarang Tandiele</b>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	1. SNI bidang industri yang diterapkan	5	Persen
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	1. Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5	Rancangan
		2. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1	Naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangsana dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100	Persen
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80,1	Nilai

Total Anggaran Tahun 2020 : Rp. 26,800,000,000,-  
(dua puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah)

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri



Eko S. A. Cahyanto

Jakarta, Januari 2020  
Kepala Pusat Standardisasi Industri



Yan Sibarang Tandiele

Tabel 3.1. Rencana Aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020

RENCANA AKSI													
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI													
TAHUN ANGGARAN 2020													
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Koordinator
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	2%	1) Koordinasi dengan Komtek dan Sub Komtek; 2) Perencanaan perumusan RSNi 2018; 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 6) Pengumpulan Data.	3%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi; 4) Peninjauan SNI; 5) Pengumpulan Data	4%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNi tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 4) Pembuatan Laporan.	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian	Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	25%	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	50%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	75%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN	100%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Kerjasama Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah	25%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	50%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	75%	1) FGD Penyusunan konsep NA 2) Penyusunan Draft NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	100%	1) Finalisasi Konsep NA 2) Penyusunan Laporan	- Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri	Peneliti
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang hibangyasi dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenerperin	100%	25%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmattirik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	50%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmattirik)	75%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmattirik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengawasan Hukum Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	25%	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja	50%	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA-KL 4) rapat koordinasi	75%	1) Pemantapan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	100%	1) penyiapan dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan Laporan Kegiatan	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Program dan Tata Usaha

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri,



Ni Nyoman Ambareny

### 3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dalam Perjanjian Kinerja

Berikut realisasi pencapaian Triwulan III Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian Triwulan III Perjakin Pustan Industri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN III (%)		
				Rencana kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNI; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data.	3%	5,7%
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN	75%	80%
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1) Penyusunan Draft NA 2) Koordinasi dengan stakeholder Notifikasi	75%	75%
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib.	75%	60%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	1) Pemantapan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	75%	50%

## 1. Sasaran Strategis I: Tersusunnya RSNI,ST dan/atau PTC

Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Kegiatan I Triwulan III Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN III (%)		
				Rencana kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	6) Rapat Teknis; 7) Rapat Konsensus; 8) Monitoring perumusan RSNI; 9) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 10) Pengumpulan Data.	3%	5,7%

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja :

### 1. SNI bidang industri yang diterapkan:

#### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada TRIWULAN III direncanakan target sasaran fisiknya sebesar 4% dan realisasi yang tercapai sebesar 5,7% SNI bidang industri yang diterapkan.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sosialisasi penerapan SNI, Rapat Konsensus untuk 13 RSNI dari 76 target penyusunan RSNI tahun 2020, proses pemberlakuan secara wajib untuk 8 SNI.

Jumlah SNI Bidang Industri per Juni 2020 adalah 4.984 SNI, Persentase progress fisik:

- 113 SNI (2,3 %) yang diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian.
- 173 SNI (3,4 %) yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha.

#### b. Kendala

- 1) Masih lemahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha untuk menerapkan SNI.
- 2) Kurangnya infrastruktur khususnya sarana pengujian.
- 3) Belum efektifnya penerapan Perpres Nomor 16 tahun 2018 untuk mendorong penggunaan produk ber-SNI
- 4) Keterbatasan anggaran untuk kaji ulang SNI Bidang Industri yang sudah berumur  $\geq 5$  thn. ( $\pm 80\%$  dari 4.984 SNI Bidang Industri)

#### c. Rekomendasi

Membina perusahaan industri melalui bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standardisasi Industri.

## 2. Sasaran Strategis II: Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian

Tabel 3.4. Pencapaian Sasaran Kegiatan II Triwulan III Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN III (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN	75%	80%
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1) Penyusunan Draft NA 2) Koordinasi dengan stakeholder Notifikasi	75%	75%

Sasaran Strategis II terdiri dari Indikator Kinerja :

### 1. Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi

Dalam rangka mendukung pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara wajib, Pusat Standardisasi Industri menyiapkan rancangan regulasi teknis dalam penerapan dan pemberlakuan SNI wajib tersebut.

#### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

Pada Triwulan III direncanakan target sasaran fisiknya sebanyak 5 rancangan dan sampai dengan triwulan ini tercapai 1 Peraturan Menteri dan 3 rancangan regulasi. Pada triwulan ini regulasi teknis yang telah ditetapkan adalah:

1) Peraturan Menteri Perindustrian No 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

Untuk regulasi teknis yang telah diharmonisasikan adalah

- 1) Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kertas dan Karton Pembungkus Makanan;
- 2) Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sprayer Gendong Semi Otomatis dan Sprayer Elektrik ;
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian tentang Household.

#### b. Kendala:

-

### c.Rekomendasi:

-

## 2.Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu regulasi, dalyang disusun oleh Pusat Standardisasi Industri.

### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

Kegiatan pada Triwulan III mencapai realisasi fisik 75% dengan target yang diharapkan yakni 75%. Pada TRIWULAN III proses penyusunan naskah akademis mengikuti pembentukan regulasi teknis yang sedang disusun oleh Pustan Industri naskah akademis untuk Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kertas dan Karton Pembungkus Makanan, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sprayer Gendong Semi Otomatis dan Sprayer Elektrik serta Peraturan Menteri Perindustrian tentang Household.

### a. Kendala:

-

### b. Rekomendasi

-

## 3. Sasaran Strategis III: Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Hukum Proses Industri

Tabel 3.5. Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan III Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN III (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib.	75%	60%



Sasaran Strategis III terdiri dari indikator kinerja:

### **1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin**

Sehubungan dengan pelaksanaan penerapan SNI dan pemberlakuan Standardisasi Industri, maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja LPK terkait kepatuhannya dalam menerbitkan Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi LPK didapat berdasarkan laporan kinerja dan pengawasan LPK oleh Pustan Industri dan akan disampaikan dalam suatu pertemuan guna menjadi koreksi dan perbaikan kedepan.

#### **a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Pada Triwulan III realisasi fisik tercapai 60% dari target 75%. Hasil yang telah tercapai pada triwulan ini adalah telah melaksanakan rapat koordinasi dan pengawasan ke LPK LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi (IGS), Balai Besar Kerajinan dan Batik (TOEGOE), Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (JPA), PT. Carsurin, PT. SERTIFIKASI PRODUK INDONESIA, PT. Penilai Standar Nasional, PT. Pusat Sertifikasi Produk Indonesia (PSPI), PT. Sucofindo (Persero) - SBU Sertifikasi & Eco Framework, PPMB (Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan), PT. Intertek Utama Services, CEPRINDO, PT. UL International Indonesia, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), Balai Besar Keramik (BBK), Balai Besar Logam dan Mesin (MIDC), Balai Besar Industri Agro (ABIPro), Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) dan Baristand Industri Pontianak (Borneo) serta melakukan monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU disertai koordinasi dengan Kepolisian RI

#### **b. Kendala:**

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pengawasan LPK dan tertundanya pelaksanaan kegiatan penegakan hukum standardisasi industri berupa, kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) secara berkala/sewaktu-waktu terhadap penerapan pemberlakuan SNI wajib, selama masa pandemi koordinasi dengan aparat penegakan hukum saat ini tetap dilakukan dalam bentuk koordinasi tanpa tatap muka menggunakan media elektronik

#### **c. Rekomendasi:**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan

#### 4. Sasaran Strategis IV: Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi

Tabel 3.6. Pencapaian Sasaran Kegiatan IV Triwulan III Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN III (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	1) Pemantapan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	75%	50%

Sasaran Strategis IV terdiri dari indikator kinerja:

##### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

###### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

pada Triwulan III realisasi fisik tercapai 50% dari 75%. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan telah menetapkan program kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2020
- b. Telah disusun Renstra PSI 2020-2024 dan mereviu Rencana Kinerja PSI tahun 2021
- c. Melakukan koordinasi dengan Balai dan instansi terkait dalam pengumpulan data terkait monitoring dan evaluasi kegiatan Pustan

###### d. Kendala:

-

###### e. Rekomendasi:

-

##### 3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Tabel 3.7 Pagu Anggaran Kegiatan TA 2020 (Triwulan III)

	Output	Pagu
		(Rp 000)
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2.275.482
1860.002	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.625.486
1860.003	Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri	595.210
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	2.605.140

1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	30.971
1860.010	Layanan Manajemen Satker	685.544
	JUMLAH	7.817.833

## 1. Output I: Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri

Tabel 3.8 Realisasi Output I sampai dengan Triwulan III TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN III			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2.275.482				
1 Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk IKM dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.334.192	96.39%	27.42%	85.00%	55.00%
2 Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain	517.564	62.62%	25.06%	82.00%	50.00%
3 Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	254.950	94.02%	32.28%	77.50%	49.70%
4 Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI	168.776	46.39%	45.01%	71.00%	55.40%

### a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:

Pagu anggaran untuk output I sebesar Rp. 2.275.482.000,- Triwulan III realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran. Realisasi fisik yang telah tercapai adalah telah dilaksanakannya FGD Penyusunan Skema Sertifikas pada bulan Agustus 2020, FGD Penilaian dan Penyusunan Regulasi Teknis pada bulan Juli 2020

### b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2020

### c. Rekomendasi:

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV

## 2. Output II: Rekomendasi Hasil Pengawasan Standardisasi Industri

Tabel 3.9 Realisasi Output II sampai dengan Triwulan III TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN III			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</b>	<b>1.625.486</b>				
1 Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perindustrian	<b>94.932</b>	10.60%	2.27%	90.00%	50.00%
2 Penegakan Hukum Standardisasi Industri	533.016	82.57%	39.58%	90.00%	73.75%
3 Penyusunan Sistem Manajemen Pengawasan Standardisasi Industri	164.480	92.70%	91.88%	86.67%	68.40%
4 Forum Pengawasan Standardisasi Industri	172.068	1.74%	1.95%	42.73%	30.50%
5 Pengawasan Standardisasi Industri	661.580	87.96%	47.64%	72.23%	64.80%

### a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:

Output Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri pada Triwulan III realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran. Realisasi fisik yang telah tercapai adalah telah dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Manajemen Pengawasan Standardisasi Industri dan FGD Pengawasan Standardisasi Industri pada bulan Juli 2020.

### b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2020

### c. Rekomendasi:

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

### 3. Output III: Penguatan SDM Standardisasi Industri

Tabel 3.10 Realisasi Output III sampai dengan Triwulan III TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN III			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri</b>		595.210				
1	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri	595.210	100.00%	91.61%	100.00%	88.75%

#### a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Penguatan SDM standardisasi industri pada Triwulan III realisasi keuangan untuk Pelatihan Petugas Pengawas Standardisasi Industri (PPSI) realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan ini adalah Penyusunan laporan dan pengumpulan data kegiatan terkait Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020

#### b. Kendala:

-

#### c. Rekomendasi:

-

### 4. Output IV: Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri

Tabel 3.11 Realisasi Output IV sampai dengan Triwulan III TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN III			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Pengembangan Standardisasi Industri</b>		<b>2.605.140</b>				
	Kajian Efektivitas Penerapan Sni Semen	330.031	74.59%	39.97%	90.00%	67.90%
	Penyusunan Kebijakan Standardisasi Dalam Rangka Mendukung Revolusi Industri 4.0	312.625	72.47%	35.96%	80.00%	58.50%
	Peninjauan Sni	152.728	92.08%	9.73%	80.00%	81.30%
	Rapat Teknis/konsensus	1.729.186	82.96%	46.81%	78.76%	67.30%
	Perencanaan Perumusan Rsn	80.570	91.01%	38.28%	79.65%	69.00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output IV sebesar Rp. 2.605.140.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III seperti pada Tabel 3.10. RSNi yang telah dikonsensuskan yaitu:

No.	Judul
1	Mesin Tanam Bibit Padi Tipe Dorong – Syarat Mutu dan Metode Uji
2	Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum – Spesifikasi, Unjuk Kerja dan Metode Uji
3	Mesin Milling CNC 3 Axis dengan Spindel Vertikal atau Kepala Umum dengan Sumbu Putar Utama Vertikal (Sumbu-Z Vertikal) - Syarat Mutu dan Metode Uji
4	Mesin Penggilingan Gabah sekali Umpan – Syarat Mutu dan Metode Uji
5	Cocoa butter alternatif
6	Santan
7	Remah roti
8	Tepung jagung
9	Dendeng
10	Rendang
11	Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas untuk Aplikasi Struktur Umum dan Struktur Las (Bj PS)
12	Baja lapis timah elektrolisa (Bj LTE)
13	Standar metode uji untuk abu total dalam kulit
14	Kulit - Uji kimiawi - Penentuan kadar pH dan nilai beda
15	Benang karet - Metode uji
16	Sarung tangan karet rumah tangga-Persyaratan umum dan metode uji
17	Benang karet untuk keperluan umum – Spesifikasi
18	Sarung tangan lateks karet alam untuk ruang uang-bersih- Spesifikasi
19	Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas
20	Sistem perpipaan platik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 1: Umum
21	Sistem perpipaan platik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 2: Pipa
22	Sistem perpipaan platik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 3: Fitting
23	Sistem perpipaan platik untuk penyaluran bahan bakar gas - Polietilena (PE) - Bagian 4: Katup
24	Pembahasan RSNi Peralatan masak (Cookware)
25	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari Baja Tahan Karat (Flatware)
26	Spesifikasi Galvanisasi Celup Panas
27	Kertas, karton, pulp dan cellulose nanomaterial – Cara uji kadar abu pada 525 °C
28	Kertas medium – Ketahanan tekan tepi medium gelombang (metode pelat lentur)
29	Lindi hitam – Cara uji padatan total
30	Lindi hitam – Cara uji lindi hitam proses soda dan proses sulfat
31	Kertas medium - Cara uji ketahanan tekan datar setelah penggelombang di laboratorium (A-flute)
32	Kertas dan karton - Cara uji daya tembus udara dan daya tahan udara (rentang medium) – Bagian 5: Metode Gurley
33	Kertas dan karton - Cara uji ketahanan tarik setelah direndam air
34	Kertas, karton, pulp dan cellulose nanomaterial–Cara uji kadar abu pada 900 °C
35	Kertas kemasan - Bagian 1: Kertas liner dan kertas medium
36	Kertas cetak salut
37	Tekstil – Persiapan, penandaan dan pengukuran contoh uji kain dan garmen dalam pengujian untuk penentuan perubahan dimensi
38	Tekstil – Tolak minyak – Uji resistensi hidrokarbon
39	Tekstil – Cara uji tahan luntur – Bagian X12: Tahan luntur warna terhadap gosokan
40	Tekstil – Cara penilaian kenampakan pakaian dan produk akhir tekstil lainnya setelah pencucian rumah tangga dan pengeringan
41	Tekstil-Kain untuk gaun bedah (surgical gown) dan coverall
42	Tekstil – Masker dari kain
43	Ubin keramik: Bagian 3: Penentuan penyerapan air, porositas semu, densitas semu relatif dan densitas curah
44	Ubin keramik - Bagian 4: Penentuan kuat lentur dan beban lentur
45	Kloset duduk
46	Spesifikasi unjuk kerja semen hidrolis
47	Kulit – Penentuan kimiawi kadar krom oksida – Bagian 1: Kuantifikasi dengan cara titrasi
48	Kulit – Penentuan kimiawi kadar krom oksida – Bagian 3: Kuantifikasi dengan cara spektrometri serapan atom
49	Kulit – Penentuan kimiawi kadar kromium (VI) dalam kulit – Bagian 1: Metode kolorimetri
50	Kulit – Penentuan kimiawi kadar kromium (VI) dalam kulit – Bagian 2: Metode kromatografi

No.	Judul
51	Kulit – Penentuan ketahanan air kulit fleksibel – Bagian 2: Kompresi Ulang Bersudut (Maeser)
52	Kulit – Uji fisis dan mekanis – Penentuan absorpsi uap air
53	Kertas dan karton - Cara uji gramatur
54	Kertas - Cara uji ketahanan retak
55	Karton - Cara uji ketahanan retak

**b.Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2020

**c.Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

**5. Output V: Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri**

Tabel 3.12 Realisasi Output V sampai dengan TRIWULAN III TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN III			
		Keuangan		Fisik	
		S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri	30.971				
1 Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib	30.971	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

**a.Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output V adalah sebesar Rp. 30.971 dengan anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000.000 yang telah dipotong untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan penghentian serta proses pembatalan lelang sesuai dengan surat Sekretaris BPPI Nomor 1125/BPPI.1/PR/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal penghentian proses pengadaan dan surat Kepala Pustan Industri Nomor 296/BPPI.4/IV/MS/2020 tanggal 15 April 2020 perihal pembatalan lelang cepat PSI.

**b.Kendala:**

-

**c.Rekomendasi:**

-

## 6. Output VI: Layanan Manajemen Satker

Tabel 3.13 Realisasi Output VI sampai dengan Triwulan III TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN III			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Layanan Manajemen Satker	685.544				
1 Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja	208.080	60.00%	75.60%	65.00%	73.75%
2 Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021	197.250	19.42%	0.00%	65.00%	58.00%
3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Persiapan Penilaian SAKIP	227.859	60.00%	40.71%	75.00%	73.75%
4 Evaluasi Rencana Strategis Pustan Industri	31.940	60.00%	2.35%	60.00%	60.00%
5 Reviu Penerapan SPIP Pusat Standardisasi Industri	20.415	56.00%	9.12%	65.00%	54.00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output V sebesar Rp. 685.544.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III seperti pada Tabel 3.14.

**b. Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2020

**c. Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV.



## **3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

### **3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Pusat Standardiasi Industri kepada BPPI ada 4 sasaran strategis, masing-masing kegiatan mempunyai target yang harus dicapai tetapi dengan adanya hambatan dan kendala yang ada menyebabkan pencapaian target tidak diperoleh. Hambatan pada tahun 2020 adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwula III tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

### **3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan**

Kegiatan yang terdapat di Pustan Industri ada 6 (enam) Kegiatan. Sama halnya dengan pelaksanaan berdasarkan perjanjian kinerja, hambatan yang dihadapi terkait pandemi covid 19 dan mekanisme pencairan.

## **3.3 Langkah Tindak Lanjut**

### **3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan pada triwulan IV.

### **3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan pada triwulan IV.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Pusat Standardisasi Industri sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 ini terdapat banyak kendala sehingga realisasi keuangan sebesar 41,76% dari target 79,22% dan realisasi fisik 64,24% dari 80,88%. Sedangkan pada Triwulan III Tahun 2019, Realisasi Keuangan 6,03% lebih rendah dari target yang ditentukan yaitu 54,08% dan Realisasi Fisik mencapai 67,19% dari target 65,57% pada Triwulan III. Permasalahan yang dihadapi adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwulan III tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian Triwulan III, Pusat Standardisasi Industri akan melaksanakan kegiatan dengan se-efektif dan seefisien mungkin dan turut berkoordinasi dengan BPPI, Direktorat dan lembaga terkait dalam menyelesaikan kegiatan yang ada.

Jakarta, 6 Oktober 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



**Ni Nyoman Ambareny**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

**I. DATA UMUM**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi        | : (248035) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri                  |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi                 | : 04. Ekonomi  |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi             | : 04.07. Industri Dan Konstruksi                                       |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program                | : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri      |
| 5. Indikator Hasil                            | :  |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan               | : 1860 - Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : 1/1  |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan                  | : Ir Ni Nyoman Ambareny, M.Si.   |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 20                        |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA               | : SP DIPA A-019.07.1.248035/2020                                       |

**II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN**

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri		-	2.275.482	2.275.482	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	13 Regulasi
002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri		-	1.625.486	1.625.486	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengawasan Standardisasi Industri	10 Rekomendasi
003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri		-	595.210	595.210	Jumlah Personil Auditor/Asesor, Petugas Penguji, Petugas Inspeksi, Petugas Kalibrasi, PPSI dan/atau PPNS-I yang Kompeten	25 Orang
004 Pengembangan Standardisasi Industri		-	2.605.140	2.605.140	Tersusunnya RSNI, ST dan/atau PTC	76 Standar
005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian		-	30.971	30.971	Jumlah Alat	1 Unit
010 Layanan Manajemen Satker		-	685.544	685.544	Terlaksananya Layanan Manajemen Satker	1 Laporan
<b>Total</b>		-	<b>7.817.833</b>	<b>7.817.833</b>		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	32,97	17,24	43,73	33,18	34,33	8,12	25,49	20,11	67,29	25,36	70,22	53,30	DKI JAKARTA
002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan	20,60	13,96	36,92	30,14	33,00	13,35	29,24	33,47	53,60	27,31	66,16	63,51	DKI JAKARTA
003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	91,77	91,61	85,00	85,00	8,23	-	3,75	3,75	100,00	91,61	88,75	88,75	DKI JAKARTA
004 Pengembangan Standardisasi Industri	30,16	19,35	37,21	37,54	36,45	11,60	28,06	29,26	66,61	30,55	65,27	67,19	DKI JAKARTA
005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	DKI JAKARTA
010 Layanan Manajemen Salker	25,89	16,59	39,67	39,98	13,87	11,92	21,31	25,36	39,76	28,52	60,99	65,33	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	<b>33,58</b>	<b>23,20</b>	<b>43,15</b>	<b>38,94</b>	<b>30,84</b>	<b>10,05</b>	<b>25,30</b>	<b>25,07</b>	<b>64,42</b>	<b>33,25</b>	<b>68,45</b>	<b>64,01</b>	



## LAMPIRAN 2 FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Dalam Rencana Aksi		Realisasi TW II		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak	Penanggung Jawab	Koordinator
				Target Fisik (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan					
1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	4%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNI; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data	5,7%	- sosialisasi penerapan SNI, Rapat Konsensus untuk 13 RSNI dari 76 target penyusunan RSNI tahun 2020, proses pemberlakuan secara wajib untuk 8 SNI, penguatan SDM Pengawas Standarisasi Industri melalui Pelatihan PPNS untuk 25 orang, pengawasan produk yang diberlakukan SNI wajib - Jumlah SNI Bidang Industri per Juni 2020: 4.984 Persentase progress fisik: 113 SNI (2,3 %) yang diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian, 173 SNI (3,4 %) yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha.	- Masih lemahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha untuk menerapkan SNI. - Kurangnya infrastruktur khususnya sarana pengujian. - Belum efektifnya penerapan Perpres Nomor 16 tahun 2018 untuk mendorong penggunaan produk ber-SNI - Keterbatasan anggaran untuk kaji ulang SNI Bidang Industri yang sudah berumur ≥ 5 thn. (± 60% dari 4.984 SNI Bidang Industri)	- Membina perusahaan industri melalui bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemyarakatan Standarisasi Industri. - Meningkatkan infrastruktur standarisasi untuk SDM, sarana dan prasarana pengujian. - Meningkatkan pengawasan SPPT-SNI di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar melalui koordinasi dengan K/L terkait - Meningkatkan pengawasan LSPro dim	Triwulan IV	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standarisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/di harmonisasi	5 Rancangan	75%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan	80%	Pada triwulan ini regulasi teknis yang telah ditetapkan adalah: 1)Peraturan Menteri Perindustrian No 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib. Untuk regulasi teknis yang telah diharmonisasikan adalah 1)Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kertas dan Karton Pembungkus Makanan; 2)Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sprayer Gendong Semi Otomatis	Dampak covid 19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang penunjukan LPK dan penyusunan skema sertifikasi produk SNI serta tertunda/terhambatnya pelaksanaan sidang terkait regulasi teknis standarisasi ditingkat ASEAN	melakukan revisi anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan FGD panel penunjukan secara online	5 bulan atau sampai dengan Nopember 2020	Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Kerjasama Standarisasi Industri	Kepala Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standarisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standarisasi Industri	1 Naskah	75%	1) FGD Penyusunan konsep NA 2) Penyusunan Draft NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	75%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder 3) tersusun draft naskah akademis rancangan peraturan menteri terkait SNI wajib Kertas dan Karton untuk kemasan pangan.	Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertunda/terhambatnya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dan Skema sertifikasi	mengikuti jadwal penyusunan Rancangan kebijakan	5 bulan atau sampai dengan Nopember 2020	Kepala Subbidang Penguatan Standarisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standarisasi Industri	Peneliti
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%	75%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai	60%	pada triwulan ini adalah telah melaksanakan rapat koordinasi dan pengawasan ke LPK LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi (IGS), Balai Besar Kerajinan dan Batik (TOEGOE), Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (JPA), PT. Carsurin, PT. SERTIFIKASI PRODUK INDONESIA, PT. Penilai Standar Nasional, PT. Pusat Sertifikasi Produk Indonesia (PSPI), PT. Sucfindo (Persero) - SBU Sertifikasi & Eco Framework, PPMB (Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan), PT. Intertek Utama Services, CEPRINDO, PT. UL International Indonesia, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (BBT), Balai Besar Keramik (BBK), Balai Besar Logam dan Mesin (MIDC), Balai Besar Industri Agro (ABIPro), Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPI) dan Baristand Industri Pontianak (Borneo) serta melakukan monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU disertai	Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan pengujian hukum standarisasi industri berupa, kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (VIASMATLITRIK) secara berkala/sewaktu-waktu terhadap penerapan pemberlakuan SNI wajib, selama masa pandemi koordinasi dengan aparat penegakan hukum saat ini tetap dilakukan dalam bentuk koordinasi tanpa tatap muka menggunakan media elektronik	Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan	Triwulan IV	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standarisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standarisasi Industri
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	75%	1) Pemantapan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	50%	a.Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan telah menetapkan program kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 b.Telah disusun Renstra PSI 2020-2024 dan merevisi Rencana Kinerja PSI tahun 2021 c.Melakukan koordinasi dengan Balai dan instansi terkait dalam pengumpulan data terkait monitoring dan evaluasi kegiatan Pustan	Dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021	Menyegerakan pelaksanaan kegiatan yang tertunda setelah situasi memungkinkan	Triwulan IV	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha